

Pemberdayaan Petani Kelapa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Samsudin¹ Nurmasari²

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kharudin Nasution
No. 133 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia
samsudin@student.uir.ac.id nurmasari@soc.uir.ac.id

Received : August 21, 2024;

Accepted : 25 August 2024

Abstract

The Plantation Service is expected to be able to make efforts to empower coconut farming communities in managing the harvest. Efforts that must be made by the relevant Department are by carrying out outreach such as: counseling, and providing knowledge about innovations in developing harvests to be processed into a product. However, what happens is a lack of attention from the relevant agencies so that people feel that their fate is not cared about by the government. Meanwhile, the majority of people depend on coconut plantations for their economy. The aim of this research is to determine the empowerment of coconut farmers in improving the community economy in Lahang Hulu Village, Gaung District, Indragiri Hilir Regency and the inhibiting factors. The research method used is a qualitative method with data collection through interviews, observation and documentation. The informants in this research were the Head of the Indragiri Hilir District Agriculture Service and the Head of Lahang Hulu Village, RT, RW and the Community in Lahang Hulu Village. The results of the research are the role of the Indragiri Hilir Regency Plantation Service in Empowering Coconut Farmers in Gaung District, according to plantation officers (Employees of the Indragiri Hilir Regency Plantation Service) who have carried out their duties in carrying out extension activities in terms of community empowerment in the field of Coconut Farming.

Keywords: Empowerment, Economy, Coconut Farmers

Abstrak

Dinas Perkebunan diharapkan mampu berupaya melakukan Pemberdayaan terhadap masyarakat petani kelapa dalam mengelola hasil panen tersebut. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Dinas terkait yaitu dengan melakukan sosialisasi seperti: penyuluhan, dan memberikan ilmu pengetahuan tentang inovasi-inovasi dalam mengembangkan hasil panen untuk diolah menjadi suatu produk. Namun yang terjadi adalah kurangnya perhatian dari dinas terkait sehingga masyarakat merasa tidak diperdulikan nasibnya oleh pemerintah. Sedangkan mayoritas masyarakat menggantungkan ekonominya dari hasil perkebunan kelapa. Tujuan dari penelitian ini untuk pemberdayaan petani kelapa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir serta faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, pengamatan dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepala Desa Lahang Hulu, RT, RW serta Masyarakat di Desa Lahang Hulu. Hasil penelitian yaitu Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Kecamatan Gaung menurut petugas perkebunan (Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir) telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan penyuluhan dalam hal pemberdayaan masyarakat dibidang Petani Kelapa.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Perekonomian, Petani Kelapa

Pendahuluan

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mendelegasikan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan agar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam pelaksanaan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat desa, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan, selain itu untuk meningkatkan pelayanan masyarakat perlu dibentuknya kelurahan untuk memperlancar terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Diaturnya bentuk pemerintahan dengan bertingkat adalah agar tujuan penyelenggaraan didalam pemerintahan bisa bekerja secara efektif dan juga dapat efisien bermaksud agar pemberian pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, Pengaturan pemerintah tidak hanya dipusatkan kepada pemerintah pusat saja, dapat dilakukan dengan baik selaku pemilik didalam pemerintahan.

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perkebunan serta dapat melaksanakan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada daerah dalam rangka desentralisasi. Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perkebunan lingkup pengembangan perkebunan, sarana dan prasarana, peningkatan produksi perkebunan, serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
4. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dengan ini pemerintah diharapkan dapat menjalankan peran Dinas Perkebunan dalam pemberdayaan masyarakat petani kelapa sebagai mana yang di atur dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya pada ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Kelapa merupakan mata pencaharian jutaan petani yang mampu memberikan penghidupan bagi puluhan juta keluarga. Kelapa memiliki banyak manfaat karena hampir semua bagian kelapa bisa diolah atau dimanfaatkan oleh manusia mulai dari buah,

batang, bahkan daunnya. Maka dari itu kelapa sering dianggap sebagai tumbuhan serbaguna terlebih bagi wilayah pesisir.

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang membutuhkan keberpihakan penyuluhan terhadap sektor perkebunan. Keberpihakan penyuluhan akan meningkatkan produktivitas perkebunan terutama perkebunan kelapa pola swadaya. Masyarakat akan menjadi lebih peka, cerdas, dan antisipatif terhadap segala kemungkinan yang datang dan dapat menyelesaikannya. Dari seluruh kabupaten yang ada di Provinsi Riau, Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu perkebunan kelapa yang terluas, dengan luas 392.193 ha dan produksi 342.225 ton/tahun serta jumlah petani kelapa dengan jumlah 80.040 KK yang merupakan jumlah tertinggi dibandingkan dengan 11 Kabupaten lainnya di Provinsi Riau.

Komoditas kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir masih dapat dikembangkan mengingat lahan yang tersedia untuk pengembangan masih cukup luas yaitu mencapai 210.283 hektar (Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Indragiri Hilir) dan secara umum sektor kelapa merupakan mata pencaharian utama masyarakat daerah ini. Walaupun perkebunan kelapa (kopra) di Inhil dikelola dengan baik oleh para pekebun, namun pemasaran hasil perkebunan kelapa mengalami naik turun sehingga posisi tawar para petani sangat rendah dalam menentukan harga, karena mereka tergantung dengan pembelian oleh pihak swasta.

Desa Lahang Hulu adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Gaung. Desa Lahang Hulu merupakan salah satu wilayah yang banyak ditumbuhi pohon kelapa sehingga sebagian besar masyarakat di Desa Lahang Hulu mata pencahariannya sebagai petani kelapa. Akan tetapi, Pengolahan kelapa yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Lahang Hulu masih sangat kurang, hal itu dikarenakan rendahnya pengetahuan masyarakat untuk mengelolah hasil perkebunan mereka, sehingga diperlukan pengolahan yang lebih bermanfaat dan inovatif bagi masyarakat sekitar, karena pengelolaan kelapa di Desa Lahang Hulu selama ini hanya sebatas untuk dijadikan minyak dan kelapa kopra.

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum mengeluarkan regulasi khusus tentang perkebunan kelapa di Inhil serta terlalu memberikan kebebasan kepada perusahaan yang bergerak di bidang perkelapaan untuk membuat kebun sendiri bagi pasokan bahan baku industrinya. Sehingga ketika pihak perusahaan telah mampu “mandiri” dengan hasil kebun mereka sebagai bahan baku industrinya, mereka akan menekan harga pembelian kelapa petani, yang mengakibatkan harga kelapa menjadi tidak terkendali.

Pada saat terjadinya naik turunnya harga kelapa, masyarakat tidak dapat berbuat banyak dikarenakan masyarakat petani kelapa tidak memiliki inovasi untuk mengolah sendiri dari hasil panen tersebut. Melainkan masyarakat hanya menunggu kenaikan harga dari pihak ketiga yaitu Perusahaan terdekat yang berada tidak jauh dari permukiman masyarakat.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat untuk menaikkan harga kelapa. Salah satu prasyarat dan faktor pelancar pembangunan adalah, adanya kebijakan pemerintah untuk pembangunan ditingkat nasional, dan penjabrannya oleh aparat pemerintah ditingkat regional dan lokal (Provinsi, Kabupaten/Kota), serta langkah-langkah pelaksanaan yang telah dimusyawarahkan oleh warga masyarakat setempat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan harus selalu mengacu dan merupakan bagian integral yang tidak boleh terlepas bahkan harus

Samsudin dan Nurmasari

mampu memperlancar pelaksanaan serta tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati. Adapun bentuk pemberdayaan masyarakat disini adalah penyuluhan langsung dilapangan kepada masyarakat terkait dengan penyampaian informasi tentang teknologi budidaya usahatani kelapa, Penyebaran Informasi/inovasi teknologi kepada petani lain, Pengembangan diseminasi informasi/inovasi teknologi baru dan Diseminasi informasi harga saprodi dan hasil produksi

Dengan ini Dinas Perkebunan diharapkan mampu berupaya melakukan Pemberdayaan terhadap masyarakat petani kelapa dalam mengelola hasil panen tersebut. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Dinas terkait yaitu dengan melakukan sosialisasi seperti: penyuluhan, dan memberikan ilmu pengetahuan tentang inovasi-inovasi dalam mengembangkan hasil panen untuk diolah menjadi suatu produk.

Namun yang terjadi adalah kurangnya perhatian dari dinas terkait sehingga masyarakat merasa tidak diperdulikan nasibnya oleh pemerintah. Sedangkan mayoritas masyarakat menggantungkan ekonominya dari hasil perkebunan kelapa. Dalam hal ini pemerintah seharusnya melakukan Pemberdayaan masyarakat petani kelapa agar mampu menjawab tantangan di era globalisasi yang membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, para pelaku ekonomi, rakyat, lembaga pendidikan, organisasi profesi serta organisasi organisasi non pemerintah lainnya.

Komitmen itu dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kepercayaan berkembangnya kemampuan-kemampuan lokal atas dasar kebutuhan setempat. Kurangnya Perhatian Dinas terkait menjadi salah satu faktor penghambat ekonomi masyarakat petani. Adapun fenomena lain seperti: Kurangnya perhatian dari Dinas Perkebunan dalam melakukan sosialisasi seperti penyuluhan dan memberikan ilmu pengetahuan tentang inovasi-inovasi dalam mengembangkan hasil panen untuk diolah menjadi suatu produk. Tidak adanya wadah untuk menampung hasil produksi yang dikelola sendiri oleh masyarakat petani kelapa. Minimnya bantuan dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan kepada masyarakat petani kelapa yang belum mempunyai kelompok tani.

Tinjauan Pustaka

Konsep Administrasi

Menurut Siagian (2003:2) administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Atmosudirjo (dalam Zulkifli, 2005: 17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Administrasi menurut Reksohadiprawiro (dalam Widjaja, 2004: 37) adalah tata usaha yang mencakup setiap pengaturan yang rapi dan sistematis serta penetapan fakta-fakta secara tertulis dengan tujuan memperoleh pandangan yang menyeluruh serta hubungan timbal balik antara satu fakta lain.

Konsep Organisasi

Menurut Siagian (2003:6) organisasi ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Gibson, et. Al (1996:6) mendefinisikan "organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri".

Menurut Robbin (2000:4) "organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan".

Konsep Manajemen

pengendalian dan pemanfaatan daripada semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja tertentu.

Pendapat Siagian (2003:5) manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena memang manajemen merupakan alat pelaksana utama administrasi.

Menurut Haiman (dalam Manullang, 2004:1) manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama.

Konsep Pemerintah Daerah

Sebuah pemerintahan dimana bila dibagi atau dipisahkan, maka akan Nampak sebuah perbedaan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit ialah sebuah lembaga yang hanya meliputi mengurus pelaksanaan roda pemerintahan(disebut eksekutif), sedangkan pemerintah dalam arti luas dimana selain dia eksekutif, tetapi ia juga termasuk sebuah lembaga yang juga ikut berperan dalam membuat peraturan perundang-undangan (disebut legislative), dan yang melakukan adalah sebuah peradilan (disebut yudikatif) (Inu Kencana Syafie,2005:21-22).

Berdasarkan penjelasan dalam pasal 18 UUD 1945 menjelaskan bahwa asas pemerintahan daerah adalah sebuah dasar dalam permusyawaratan. Jadi pemerintahan daerah mempunyai peranan untuk mewujudkan dan menjaminnya Demokrasi pancasila sampai kedaerah plosok tanah air. Selain dari pada itu pembentukan pemerintahan daerah bertujuan menciptakan efisiensi, efektivitas dan pemerataan dalam pembangunan nasional, denagn demikianlah mengenai penjelasan umum dalam UU No. 5 Tahun 1974. Hal ini menjadi tanggung jawab besar yang dipegang dan dibebani kepada kepala wilayah.

Mengenai Pemerintahan Daerah telah diatur dalam UU No. 5 Tahun 1974 pemerintah daerah adalah pemerintah yang dijalankan berdasarkan hubungan pemerintah yang Samsudin dan Nurmasari

dijalankan berdasarkan hubungan pemerintah yang dibuat atau diciptakan dengan menggunakan teknis desentralisasi, teknis ini lazim disebut asas desentralisasi, Berdasarkan pasal 1 huruf b UU No. 5 Tahun 1974 menyatakan, bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Sedangkan di dalam konteks otonomi daerah, terdapat dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menyelenggarakan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah dengan berpegangan pada asas penyelenggaraan pemerintahannya.

Konsep Otonomi Daerah

Berdasarkan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa otonomi Daerah adalah Hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberi ruang bagi daerah otonomi. Daerah otonom selanjutnya disebut Otonomi daerah hal, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Pemerintahan Daerah.

Di dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk mengutamakan pada prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Di dalam bentuk dimana mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan maka pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Konsep Peran

Peranan berdasarkan Poerwadarminta (1995:751) adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dalam suatu peristiwa” Menurut pendapat di atas peranan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat akan tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh seseorang atau orang yang berkedudukan dimasyarakat. Dimana kedudukan dan peranannya adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Menurut Soerjono Soekanto (2002; 243) Pengertian peranan adalah sebagai berikut: Peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan perannya.

Menurut Soerjano Soekanto (2002), peranan adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.

Menurut Miftha Thoha, (1997). Peranan adalah sebuah aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan,

Samsudin dan Nurmasari

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 / 2024

memberikan pemahaman yang lebih jelas adabainya terlebih dahulu kita pahami tentang pengertian peran.

Begitu peranan sangat penting sehingga dapat merubah akan status kedudukan seseorang di dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat membentuk unsur statis yang mengarahkan tempat individu pada organisasi masyarakat.

Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan juga keterampilan di dalam rangka memajukan kemampuan warga miskin dalam menentukan akan masa depannya sendiri dengan berpartisipasi didalam kehidupan masyarakatnya. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pengembangan didalam masyarakat dengan berinisiatif memulai akan proses kegiatan sosial dalam memperbaiki keadaan dan kedudukan diri sendiri. Pemberdayaan dapat terjadi jika warganya ikut dalam partisipasi. Pemberdayaan kata lainnya adalah *Empowerment* dapat diartikan didalam bahasa indonesia adalah dimana pemberdayaan merupakan sebuah konsep telah lahir adalah bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamanya masyarakat eropa. Agar dapat memahami konsep empowerment dengan tepat dan transparan dengan memahami dari latar belakang kontekstual yang diciptakan.

Pemberdayaan masyarakat menurut widjaja (2003:169) ialah upaya dalam meningkatkan akan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan akan jati dirinya, harkat martabatnya dengan maksimal untuk dapat bertahan dan mengembangkan akan dirinya dilakukan secara mandiri bai di bidang ekonomi, sosial agama dan budaya.

Menurut Suhartini (2005: 12-13) pemberdayaan masyarakat dimana menanamkan semangat kemandirian agar pada saanya nanti masyarakat harus menanamkan semangat kemandirian agar pada saatnya nanti masyarakat dapat melaksanakan pembangunan secara mandiri. Sedangkan secara idealnya bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya dalam meningkatkan harkat dan juga martabat dalam lapisan masyarakat yang dimana dapat dilihat dari keadaan sekarang bahwa tidak bisa melepaskan diri dari keadaan kemiskinan dan keterbelakangan. Sehingga kata lainnya bahwa memberdayakan merupakan memajukan dan memandirikan masyarakatnya.

Metode

Tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu metode penelitian analisis Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pengertian dari Denzin dan Lincoln (dalam Nusa Putra, 2013:62), menyatakan penelitian kualitatif adalah fokus kepada perhatian dengan beragam metode yang mencakup pendekatan intepretif dan naturalistic terhadap subjek kajiannya. Sedangkan menurut Lincoln dan Guba (dalam Lexy J Moleong, 2013:8) mengulas ciri-ciri penelitian kualitatif yaitu:

Penelitian kualitatif ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau sebuah fenomena. Dimana melakukan penelitian langsung ke Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian survey deskriptif dengan wawancara, observasi dan

Samsudin dan Nurmasari

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 / 2024

dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data. Hasil akhir dari adanya penelitian ini adalah berupa pembahasan mengenai fenomena yang telah dijelaskan pada latar belakang.

Lokasi Penelitian ini diambil terhadap penelitian Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan di Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena pertimbangan bahwa kelurahan merupakan perangkat daerah yang cukup penting dan berperan dalam pemberdayaan masyarakat dengan maksud penelitian untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan petani kelapa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

Informan kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian, dalam hal ini Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Indragiri Hilir dan Kepala Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir yang menjadi informan kunci (*Key informan*). Informan merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan utama didalam penelitian ini adalah RT, RW serta Masyarakat di Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan bagaimana tanggapan informan mengenai Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditetapkan.

Pemungkinan

Pemungkinan yang sebagaimana yang dijelaskan diatas juga diperlukan dalam pemberdayaan Petani Kelapa, khususnya di Kecamatan Gaung. Berdasarkan indikator kemungkinan mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi informan. Untuk melihat kemungkinan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemberdayaan Petani Kelapa di Kecamatan Gaung, maka penulis melakukan wawancara dengan Petani Kelapa di Kecamatan Gaung.

Berdasarkan hasil wawancara dapat menjelaskan bahwa PPL Kecamatan Gaung Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melakukan penyuluhan dan bimbingan kepada para Petani Kelapa dengan baik dan benar agar bisa meningkatkan taraf kehidupan masyarakat petani dalam hal ekonomi.

Berdasarkan hasil observasi yang telah penulis lakukan mengenai indikator kemungkinan, penulis menyimpulkan bahwa kemungkinan yang dilakukan oleh PPL Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang ada di Kecamatan Gaung mengenai kegiatan kemungkinan penyuluhan dapat dilakukan dengan baik, hanya saja ada beberapa petani yang tidak dapat tindakan langsung dari Dinas Perkebunan seperti Petani Kelapa mandiri.

Penguatan

Penguatan adalah respon yang diberikan oleh seorang guru atau atasan terhadap suatu tingkah laku siswa atau seseorang dengan tujuan agar dapat memungkinkan berulangnya kembali tindak seseorang tersebut. Pemberian penguatan sangat penting dilakukan oleh atasan kepada bawahan guna untuk meningkatkan pengetahuan seseorang dalam bidangnya.

Penguatan yang sebagaimana yang dijelaskan diatas juga diperlukan dalam pemberdayaan Petani Kelapa, khususnya di Kecamatan Gaung. Berdasarkan indikator penguatan mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi informan. Untuk melihat penguatan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemberdayaan Petani Kelapa di Kecamatan Gaung, maka penulis melakukan wawancara dengan Petani Kelapa di Kecamatan Gaung.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator penguatan dapat disimpulkan bahwa Dinas Perkebunan melakukan penyuluhan dan bimbingan terhadap para Petani Kelapa yang ada di Kecamatan Gaung dan para Petani Kelapa yang tergabung dalam anggota kelompok petani KUB merasakan dampak yang baik ketika mengikuti kegiatan penyuluhan dan bimbingan dari Dinas Perkebunan.

Perlindungan

Perlindungan adalah melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. Jadi perlindungan disini adalah peran Dinas Perkebunan dalam melindungi masyarakat / Petani Kelapa dalam hal persaingan hasil maupun harga agar menjadi seimbang.

Perlindungan yang sebagaimana yang dijelaskan diatas juga diperlukan dalam pemberdayaan Petani Kelapa, khususnya di Kecamatan Gaung. Berdasarkan indikator perlindungan mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi informan. Untuk melihat perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemberdayaan Petani Kelapa di Kecamatan Gaung, maka penulis melakukan wawancara dengan Petani Kelapa di Kecamatan Gaung.

Dari tanggapan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kepala KUB yang bertanggung jawab terhadap harga jual kelapa dan para kelompok petani KUB tidak bisa menjual kelapanya secara bebas karena terikat akan ketentuan yang telah ditetapkan oleh kepala KUB dan Dinas Perkebunan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator perlindungan, penulis dapat menyimpulkan para anggota kelompok tani dibimbing dan diberi arahan supaya membuat kelapa bersih agar bisa menjual kelapa dengan harga tinggi dan bisa bersaing dengan seimbang dengan para kelompok petani lainnya.

Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta memperbaiki. Melakukan penyesuaian atau pergantian yang diperlukan untuk mendapat suatu kondisi operasi produksi agar sesuai dengan perencanaan yang ada.

Jadi pemeliharaan disini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam pemberdayaan Petani Kelapa di Kecamatan Gaung dimana kegiatannya berupa memelihara dan menjaga keseimbangan pemasaran Petani Kelapa agar nilai harga jual kelapa yang dilakukan Petani Kelapa mampu stabil.

Pemeliharaan yang sebagaimana yang dijelaskan diatas juga diperlukan dalam pemberdayaan Petani Kelapa, khususnya di Kecamatan Gaung. Berdasarkan indikator pemeliharaan mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi informan. Untuk melihat pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pemberdayaan Petani Kelapa di Kecamatan Gaung, maka penulis melakukan wawancara dengan Petani Kelapa di Kecamatan Gaung.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan mengenai indikator pemeliharaan, penulis menyimpulkan bahwa dahulunya kegiatan pertemuan antara petugas perkebunan dan kelompok Petani Kelapa berjalan dengan baik dan rutin dilakukan, tetapi sekarang kegiatan tersebut sudah jarang terlaksana dikarenakan kurangnya keaktifan para kelompok petani dalam kegiatan tersebut.

Dari kutipan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan dari pemberdayaan masyarakat dalam hal bertani kelapa berjalan dengan baik, tetapi sejak beberapa tahun terakhir kegiatan penyuluhan dari Dinas Perkebunan sudah jarang dikarenakan anggaran dari pemerintah ditambah lagi harga kelapa sudah turun maka dari itu banyak para Petani Kelapa yang pindah ke sawit, karna sawit tidak tergantung akan cuaca. Keuntungan dari ikut kelompok Petani Kelapa adalah adanya uang kas yang bisa dipergunakan ketika diperlukan oleh para anggota seperti ketika ada kebutuhan mendesak seperti sakit ataupun anak mau masuk sekolah, kekurangannya yaitu menjual kelapa tidak bisa bebas karena telah ditentukan siapa induk semang tempat menjual kelapa yang di hasilkan oleh petani sehingga berapa harga kelapa yang telah ditetapkan oleh induk semang dari Dinas Perkebunan itulah nanti harga yang didapat sama para anggota kelompok Petani Kelapa. Lain halnya dengan Petani Kelapa mandiri dimana mereka bisa bebas menjual kelapa sesuai harga yang paling tinggi, tetapi Petani Kelapa mandiri tidak memiliki uang kas ketika ada keperluan mendesak seperti sakit. Kegiatan penyuluhan sekarang sudah kurang aktif karena hal-hal tersebut.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan mengenai analisis Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Kecamatan Gaung. Maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran-saran untuk bahan masukan bagi pihak terkait terutama Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah, bahwa Peranan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Pemberdayaan Petani Kelapa Kecamatan Gaung menurut petugas perkebunan (Pegawai Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir) telah menjalankan tugasnya dalam melakukan kegiatan penyuluhan dalam hal

pemberdayaan masyarakat dibidang Petani Kelapa. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir dalam bidang kelapa untuk sekarang ini tidak aktif dilakukan karena terkendala oleh anggaran yang kurang dan Petani Kelapa yang telah banyak beralih lahan ke kebun kelapa sawit. Hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini atau kendala dalam kegiatan pemberdayaan perkebunan di Kecamatan Gaung yang sering dihadapi kenyataannya dilapangan mengalami berbagai masalah juga baik dari kegiatan penyuluhan perkebunan itu sendiri maupun petani. Permasalahan yang dihadapi adalah kecilnya alokasi anggaran dana pemerintah daerah untuk kegiatan penyuluhan, sehingga mengakibatkan mobilitas para penyuluh perkebunan menjadi rendah.

Kemudian petani sulit untuk bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kegiatan pemberdayaan. Hal tersebut disebabkan karena masing-masing petani mempunyai kesibukan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Sehingga petani belum sepenuhnya menerapkan informasi pemberdayaan yang disampaikan dari penyuluh perkebunan. Hal ini akan berdampak terhadap hasil efektivitas produksi yang belum maksimal.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Danim, Sudarwan. 2000. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Dunn, William, 2003. *Analisis kebijakan public*. Yogyakarta. Gadjahmada press
- Fachruddin, Irfan. 2004. *Pengawasan peradilan Administrasi terhadap tindakan pemerintah*. UGM press. Yogyakarta.
- Indiahono, Dwiyanto, 2009. *Kebijakan publik*. Yogyakarta. Gaya media.
- Labolo, Muhadam, 2011. *Dinamika demokrasi, politik dan pemerintahan daerah*. Jakarta. Pt Indeks
- Manullang. 2004, *Pengembangan Sumber Daya Manusia*, BFPE, Yogyakarta
- Manullang. 2009. *Manajemen*. Gadjah Mada University. Press. Yogyakarta.
- Marbun, 2011. *Pengadilan Adiminstrasi Negara dan upaya*. UII press. Yogya.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. WPP AMP YKPN. Yogyakarta
- Muchsin, H dan Fadillah Putra, 2002. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Averroes. Malang.
- Ndraha, Talizuduhu, 1989. *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Ndraha, Talizuduhu, 2010. *Kybernologi sebagai sebuah rekontruksi ilmu pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif. 2005. *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Grasindo. Jakarta
- Simamora, Hary, 2004. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. STIE YKPN. Yogyakarta
- Soekarno, K. 1986. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta.
- Sukarna, 2011. *Dasar-dasar manajemen*. Mandar Maju. Bandung.

- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Andry, H., & Handrian, E. (2017, November). E-Implementation of E-Government In Regional Financial Management (Study at the Regional Finance and Asset Management Board of Riau Province). In *International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017)* (pp. 152-155). Atlantis Press.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Handrian, E. (2019). Pengaruh Reformasi Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi Golongan C (Sim C) Pada Sat Lantas Polresta Pekanbaru. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 137-155.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Penguatan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Kawasan Perbatasan Di Kabupaten Kepulauan Meranti. *Jurnal Kemunting*, 1(2), 183-203.
- Handrian, E., & Hawa, S. (2022). Implementasi program pengembangan perikanan tangkap pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 10(1), 49-58.
- Handrian, E., Muslikhah, U., & Rosmita, R. (2024). Diffusion of Application Policy Innovation Pekan Kita (PEKA) in Pekanbaru City. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1).
- Handrian, E., & Putriani, S. (2021). Reformasi Administrasi Pelayanan Publik di Kantor Camat Minas Kabupaten Siak Provinsi Riau. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(2), 143-154.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Nurman, Yusriadi, Y., & Hamim, S. (2022). Development of pluralism education in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 9(3), 106-120.
- Nasri, H., Nurman, N., Azwirman, A., Zainal, Z., & Riau, I. (2022). Implementation of collaboration planning and budget performance information for special allocation fund in budget planning in the regional development planning agency of Rokan Hilir regency. *International Journal of Health Sciences (IJHS) Ecuador*, 6(S4), 639-651.
- Nurman, N., Zainal, Z., & Rajasa, Y. (2021). Good Governance in Structure Belantik Raya People's Market in Siak District. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 7(2), 1-11.

Nurman, M. P. (2015). Strategi Pembangunan Daerah.

Samsudin dan Nurmasari

Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 / 2024

- Rusli, R., & Nurman, N. (2016). Implementasi Fungsi Koordinasi Camat Dalam Pembuatan Kartu Keluarga Dan Kartu Tanda Penduduk Di Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 2(1), 27-39.
- Parjiyana, P. (2015). Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2004 Tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 1(2), 41-54.
- Fista, L., & Parjiyana, P. (2024). Pelaksanaan Fungsi Kepala Desa Dalam Pembinaan Kemasyarakatan Di Desa Kuantan Babu Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Journal of Public Administration Review*, 1(1), 26-36.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Afhissa, C., & Parjiyana, P. (2017). Analisis Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Pimpinan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 207-223.
- Marcella, A., & Parjiyana, P. (2018). ANALISIS PELAYANAN UMUM DI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA INDRA KABUPATEN INDRAGIRI HULU. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 17-35.
- Suriani, L., Nisa, K., & Affandi, L. H. (2023). Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Tema Gaya Hidup Berkelanjutan di Sekolah Dasar. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(3), 1458-1463.
- Suriani, L., & Lumintang, G. (2018). Pengaruh Kompensasi, Disiplin Kerja Dan Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Pt. Transindo Jaya Bahari Maumbi Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(4).
- Suriani, L., & Sidabutar, O. J. (2019). Kualitas Pelayanan Dan Peraturan Tata Tertib Perpustakaan Terhadap Kepuasan Pemustaka Di Perpustakaan Soeman Hs. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 190-197.
- Handrian, E., Rosmita, R., & Suriani, L. (2023). Inclusive Development for Marginal Group Street Trader in Tembilahan Indragiri Hilir District. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1).
- Syafitri, I., & Suriani, L. (2019). Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Sejati Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(1), 44-54.
- Hamim, S., Vianda, L., & Pitaloka, S. (2020). Penerapan Prinsip Prinsip Pelayanan Publik Di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dan Catatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1-10.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori,

Konsep Dan Aplikasi.

- Hamim, S. (2005). Sistem Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2013). Administrasi, Organisasi Dan Manajemen Suatu Ilmu, Teori, Konsep Dan Aplikasi.
- Adnan, I. M., & Hamim, S. (2014). Filsafat Ilmu, Ilmu Pengetahuan dan Penelitian.
- Andry, H., & Yussa, A. T. (2015). Perilaku dan Etika Administrasi Publik. *Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing*.
- Handrian, E., & Andry, H. (2020). Sustainable Development Goals: Tinjauan Percepatan Pencapaian di Provinsi Riau. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 77-87.
- Andry, H. (2017). Pelayanan Publik Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan Di Kecamatan Mandau Oleh Dinas Tata Kota, Tata Ruang Dan Pemukiman Kabupaten Bengkalis. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 66-79.
- Andry, H., & Zulkifli, Z. (2023). Evaluasi pengelolaan parkir oleh dinas perhubungan kota pekanbaru. *Eqien-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(02), 194-205.
- Andry, H., Herman, H., & Rahmah, J. (2023). PELAKSANAAN KOORDINASI DINAS KESEHATAN KOTA PEKANBARU DAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PEKANBARU DALAM PENGHAPUSAN ASET KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KHUSUS (AMBULANCE). *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 12(1), 18-28.
- Abdullah, S., Hamim, S., & Ermayuna, S. (2021). Strategi Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan Di Lahan Gambut Desa Pulau Palas Kabupaten Indragiri Hilir. *Pascasarjana Ilmu Administrasi Universitas Islam Riau*, 1-83.
- Anggara, B., & Abdullah, S. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Pekanbaru Dalam Pendistribusian Gas Lpg 3 Kg Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(2), 248-261.
- Ariswanto, N. S., & Abdullah, S. (2016). Analisis Pelaksanaan Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Di Desa Berumbung Baru Kecamatan Dayun Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 197-215.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Abdullah, S., & Safri, I. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mengelola Potensi Masyarakat Desa Kampung Panjang Kabupaten Kampar. *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 242-248.
- Nurmasari, N., & Al Hafis, R. I. (2019). Desentralisasi Asimetris: Kemiskinan ditengah kelimpahan otonomi khusus papua. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 5(2), 1180-1192.
- Nurmasari, N., Komalasari, E., Mulianto, B., Nurman, N., & Amrillah, M. F. (2024). Samsudin dan Nurmasari
- Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 / 2024

PELATIHAN INOVASI BANK SAMPAH PLASTIK UNTUK PENINGKATAN
PENDAPATAN EKONOMI MASYARAKAT DI BANK SAMPAH PUAN SARI
MANDIRI. *Jurnal ADAM: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 35-40.

- Kurniawan, R., & Nurmasari, N. (2017). Analisis Kinerja Pegawai Pada Bidang Pelayanan Dan Informasi Di Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 122-134.
- Afringgo, R., Nurmasari, N., & Zubaidah, E. (2021). Efektifitas E-Warong sebagai Sarana Pengintegrasian Tujuan Program Keluarga Harapan pada Kelompok Target KUBE Berkah Harapan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 22-29.
- Nurmasari, N., & Wedayanti, M. D. (2018, August). HUMAN RESOURCE MANAGEMENT CIVIL SERVANT EMPLOYEES IN THE FRAMEWORK OF REFORM BUREAUATION IN RIAU PROVINCE. In *ICSScE 2018*.
- Herman, H., Suriani, L., & Farisha, N. (2021). Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Sampah Pada Pasar Milik Pemerintah Kota Pekanbaru. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 9(2), 81-90.
- Herman, H. (2019). Pelaksanaan Corporate Social Responsibility Oleh Stakeholders Primer Dan Skunder Di Riau. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 2(2).
- Herman, H., & Novarizal, R. (2017). Faktor-faktor ideal perusahaan dalam pelaksanaan CSR (Corporate Social Responsibility). *Sisi Lain Realita*, 2(2), 39-53.
- Nengsih, I. A., & Herman, H. (2019). Strategi Pelayanan Izin Praktek Dokter Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru. *Asketik*, 3 (2), 163–175.
- Novarizal, R., & Herman, H. (2019). Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Kemungkinan Terjadinya Pelarian (Studi Kasus Lapas Kelas II A Pekanbaru): Universitas Islam Riau. *Sisi Lain Realita*, 4(1), 90-102.
- Suri, D. M. (2017). Analisis faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penertiban dan pembinaan gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 89-101.
- Suri, D. M., & Nurmandi, A. (2021, July). Deep learning methods as a detection tools for forest fire decision making process fire prevention in Indonesia. In *International Conference on Human-Computer Interaction* (pp. 177-182). Cham: Springer International Publishing.
- Suri, D. M., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Al Fadhat, F. (2021). Narrative Policy Framework: The Role Of Media Narrative Towards Forest And Land Fire Policy In Indonesia. *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*.
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24-42.
- Yogia, M. A., & Suri, D. M. (2020). Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
- Samsudin dan Nurmasari
- Journal of Public Administration Review Vol. 1 No. 2 / 2024

Melalui Program Usaha Ekonomi Kelurahan. *Sosio Konsepsia*, 9(03), 247-256.

- Al Hafis, R. I., & Yogia, M. A. (2017). Abuse of power: Tinjauan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik di Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(1), 80-88.
- Hafis, A., Imam, R., Hakim, A., & Haryono, B. S. (2014). Aktor Pelaksana Pengelolaan Transportasi Publik Perkotaan (Studi Kasus Bus Trans Metro Di Kota Pekanbaru). *Jurnal Wacana*, 16(4), 171-178.
- Al Hafis, R. I. (2018). Pembangunan Daerah Perbatasan Yang Terabaikan: Kajian Perbatasan Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis–Selat Malaka. *Gema Publica*, 3(2), 111-119.
- Al Hafis, R. I., Warsono, H., Larasati, E., & Purnaweni, H. (2021). The paradox of collaborative governance in leprosy rehabilitation in Central Java. *Management and Entrepreneurship: Trends of Development*, 3(17), 55-67.
- Al Hafis, R. I., Wardana, D., Setiawati, S., & Putra, A. I. (2024). Proses Collaborative Governance untuk Mengurangi Dampak Abrasi. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*, 7(1), 521-529.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Zubaidah, E., & Lubis, E. F. (2021). Inovasi Layanan Aplikasi e-Samsat Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 14(2), 120-125.
- Zubaidah, E. (2018). Analisis Manajemen Perkantoran Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai PT. Pegadaian Persero Kantor Wilayah II Pekanbaru. In *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Administrasi Perkantoran*.
- Zubaidah, E., Nurmandi, A., Pribadi, U., Hidayati, M., & Lubis, E. F. (2022, March). The Factors Influencing the Community to Use E-Service in Pekanbaru City, Indonesia. In *International Conference on Public Organization (ICONPO 2021)* (pp. 310-318). Atlantis Press.
- Zubaidah, E. (2016). MANAJEMEN PANTI ASUHAN DALAM PERSPEKTIF HENRI FAYOL:(STUDY KASUS PANTI ASUHAN USMAN BIN AFFAN). *VALUTA*, 2(1), 130-139.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Pulungan, B. I. (2022). Political Interaction Strategy Corporate Social Responsibility of PT Riau Andalan Pulp and Paper in Riau Province, Indonesia. *International Journal of Sustainable Development & Planning*, 17(8).
- Wedayanti, M. D., & Susanti, H. (2019). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (CBT) Menggunakan Kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) di Pekanbaru Provinsi Riau. *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi*, 5(2), 32-37.
- Wedayanti, M. D., Nurmandi, A., Jubba, H., & Juliana, S. (2021, January). Implementation of Samsudin dan Nurmasari

Corporate Social Responsibility in PT. Riau Andalan Pulp and Paper in Pelalawan District, Riau Province. In *INCEESS 2020: Proceedings of the 1st International Conference on Economics Engineering and Social Science, InCEESS 2020, 17-18 July, Bekasi, Indonesia* (p. 71). European Alliance for Innovation.

- Wedayanti, M. D., & Zulkifli, Z. (2015). Pelaksanaan Pengawasan Barang dan Jasa Beredar Oleh Seksi Perlindungan Konsumen Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(1), 52-72.
- Parjiyana, P., Nazir, Y., Wedayanti, M. D., & Mardianto, M. (2019). Peranan Kepala Dusun Dalam Membantu Tugas Kepala Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 198-205.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2020). Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi dan Sosial*, 9(2), 88-99.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2019). Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 156-163.
- Lubis, E. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (Pnpm Mpd)(Studi Kasus: Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Di Nagari Tanjung Betung Kabupaten Pasaman). *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(2), 304-317.
- Lubis, E. F., & Indira, T. T. (2023). PENGARUH STORE ATMOSPHERE TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA AYAM PENYET CINDELARAS BAGAN BATU KABUPATEN ROKAN HILIR. *PubBis: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 1-9.
- Lubis, E. E. F. (2024). PELATIHAN PEMBUATAN SABUN CUCI PIRING UNTUK MENINGKATKAN TAMBAHAN PENDAPATAN PADA IBU-IBU KELOMPOK MELATI PUTIH DALAM PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN SUKAJADI KOTA PEKANBARU. *Multidisciplinary Indonesian Center Journal (MICJO)*, 1(1), 120-126.
- Herman, H., Kartius, K., Abdullah, S., & Hasibuan, C. R. (2024). Collaborative Governance In Overcoming Unemployment in Bengkalis Regency, Riau Province. *PERSPEKTIF*, 13(1), 164-173.
- Handrian, E., Rosmita, R., Suriani, L., & Kartius, K. (2022). Reformasi Badan Usaha Milik Desa Kesumbo Sejahtera di Desa Kesumbo Ampai Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 231-237.
- Kurniawan, A. (2020). Pengaruh Kepemimpinan Diri Sendiri Terhadap Sikap Wirausaha Pada Usaha Makanan Tradisional Di Desa Palung Raya Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(2), 179-191.

- Kurniawan, A., Rezki, D., & Riau, U. I. (2023). Collaborative Governance Dalam Menangulangi Banjir di Kota Sungai Penuh Collaborative Governance in Overcoming Floods in the City of Sungai Penuh. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 9(1), 1-18.
- TARMIZI, A., KURNIAWAN, A., ADERISKA, M., & AFRIZAL, T. (2022). Analysis of Quality Electronic Identity Card Service in Sub-District West Meral of Karimun District, Riau Islands (Integrated Sub-District Administration Service Model "Paten"). *International Journal of Society, Development and Environment in the Developing World*, 6, 62-72.
- Tarmizi, A., & Kurniawan, A. (2017). Model Administrasi Pribumi Masyarakat Adat Melayu Petalangan di Desa Sialang Godang Kabupaten Pelalawan Riau. In *Seminar Nasional "Mitigasi dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim di Indonesia* (pp. 165-177).
- Yusa, A. T., Andry, H., & Kurniawan, A. (2016). Restorasi Paradigma KUD:" Pendekatan Teori Organisasi Dalam Merebut Peluang MEA".
- Yunisman, Y., Salioso, H., Febrianto, S., Prayuda, R., & Mardatillah, A. (2022). Analysis of quality of animal health services by veterinary medical and veterinary paramedic services in food security and agricultural agency of Rokan Hilir Regency. *International Journal of Health Sciences*, 14(3), 1030-1046.
- Larasati, D., Indrastuti, S., Salioso, H., Yussa, H. A., & Suri, D. M. (2022). Analysis of the effect of job satisfaction and job motivation on the performance of cleaning officers at the environmental service agency Rokan Hilir district Indonesia. *International Journal of Health Sciences*, 6(4), 573-588.
- Salioso, H. (2016). ASN, OTDA, Politik Pilkada Serentak dan Korupsi di Indonesia. *SISI LAIN REALITA*, 1(1), 01-07.
- Adha, M. L., & Salioso, H. (2024). KINERJA ORGANISASI DI KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN BASARNAS KELAS A PEKANBARU. *JURNAL KEMUNTING*, 5(1), 1-16.
- Askarial, A., Rinaldi, K., & Salioso, H. (2016). Kota Dumai Dalam Pidato Seorang Walikota.
- Syafiie, Inu Kencana 2003 *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung. Repika Aditama
- Terry, George R. dan Rue, Leslie W., 2002. *Dasar-dasar Manajemen*, PT. Bumi Aksara. Jakarta.
- William N. Dunn. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Winarno, Bud,i 2004. *Kebijakan publik teori, dan studi kasus*. CAPS.2012. Yogyakarta